

IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIALISASI KPU PADA PEMILU GUBERNUR KALIMANTAN BARAT TAHUN 2012 DI KABUPATEN KUBU RAYA

Oleh:
SYAHIRAN
NIM. E21109053

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak, Tahun 2016

e-mail: shelembhe@yahoo.co.id

Abstrak

Permasalahan dalam penelitian ini adalah menurunnya partisipasi politik masyarakat pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dibandingkan dengan partisipasi politik masyarakat pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui Implementasi Program Sosialisasi KPU pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya. Penelitian ini menggunakan teori Edward III dengan metode deskriptif kualitatif. Hasil dari penelitian Implementasi Program Sosialisasi KPU pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya dapat dinilai berhasil dimana semua prosedur dan pedoman teknis yang telah ditentukan telah dilaksanakan dengan baik. Saran dari penelitian ini KPU Kabupaten Kubu Raya hendaknya dapat memperhatikan sumberdaya manusia dan non manusia, jumlah tim pelaksana sosialisasi perlu ditambah, melakukan sosialisasi secara rutin, memperhatikan lagi masalah reward kepada pelaksana kebijakan, melakukan koordinasi yang lebih baik lagi diantara pihak yang terlibat.

Kata-kata kunci: Implementasi Program, Sosialisasi Pemilu, Pemilihan Kepala Daerah, Komisi Pemilihan Umum

Abstract

The problem in this study is the declining political participation of the people in the elections of Governor and Vice Governor of West Kalimantan in 2012 compared to the political participation of the people in the elections of Governor and Vice Governor of West Kalimantan in 2007. This study aimed to determine the KPU Socialization Program Implementation in West Kalimantan Governor Election 2012 in Kubu Raya. This study uses the theory of Edward III with descriptive qualitative method. The results of the study KPU Socialization Program Implementation in West Kalimantan Governor Election 2012 in Kubu Raya can be considered successful where all procedures and technical guidelines that have been determined had been implemented properly. Suggestions from this study Kubu Raya Regency should be able to pay attention to human and non-human resources, the number of the implementation team should be increased socialization, to socialize regularly, pay attention to another issue rewards to implementing the policy. coordinate better among the parties involved

Keywords: Program Implementation, Socialization Election, local elections, The National Election Commission

A. PENDAHULUAN

Sistem pemilu secara langsung dirasakan lebih menjanjikan terciptanya demokratisasi apabila dibandingkan dengan system sebelumnya sesuai dengan UU No.5 Tahun 1974 ataupun UU No.2 Tahun 1999 karena kesempatan masyarakat untuk memilih pemimpin didaerahnya secara bebas tanpa adanya tekanan, baik berupa intimidasi ataupun kekerasan politik dirasakan sangat luas.

Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum diatur mengenai penyelenggara Pemilu yang dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Tugas pokok dan wewenang KPU adalah: Menyelenggarakan Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Kota; Menyelenggarakan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden; Menyelenggarakan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Dalam menjalankan tugasnya, KPU dibantu oleh Sekretariat Jenderal; KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota masing-masing dibantu oleh sekretariat.

KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai penyelenggara Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di tingkat provinsi membuat

keputusan yang tertuang dalam keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat nomor 12/kpts/KPU-Prov/019/Tahun 2012 tentang pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, hal ini merupakan turunan dari Peraturan KPU Nomor 11 Tahun 2010 dimana KPU adalah lembaga penyelenggaraan pemilu yang bersifat nasional, tetap dan mandiri. Kemudian peran KPU dalam sosialisasi merupakan proses penyampaian informasi mengenai sistem, tata cara teknis, tahapan, program dan jadwal, hasil pemilu, serta hal-hal lain tentang penyelenggaraan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Tujuan dari keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat nomor 12/kpts/KPU-Prov/019/Tahun 2012 ini yaitu :

- a. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat akan pentingnya Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam membangun kehidupan demokrasi di Indonesia;
- b. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang program, tahapan, jadwal, dan hasil Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat tentang be-

berapa hal teknis dalam menggunakan hak politik dan hak pilihnya dalam Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- d. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Melihat landasan normatif dalam rangka pelaksanaan sosialisasi pemilihan umum yang dilakukan di Kabupaten Kubu Raya yang merupakan salah satu daerah yang baru menyelenggarakan dengan jumlah pemilih dari data yang berhasil dihimpun hanya sebesar 61,19% (DPT 381.410 sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 233.383) mengalami penurunan partisipasi pemilih bila dibandingkan dengan pemilu kepala daerah dan wakil kepala daerah pada tahun 2007 sebesar 64,18% (DPT 328.926 sedangkan jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya 211.095). untuk lebih jelas dapat dilihat dari bentuk table daftar pemilih dan jumlah pemilih di Kabupaten Kubu Raya pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dan Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

Tabel. 1

Perbandingan Jumlah Pemilih Terdaftar dan Pemilih yang ikut memilih Pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 dan Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012

No	Kecamatan	Pemilih Terdaftar PILGUB 2007	Pemilih yang memilih	(%)
1	Sungai Raya	128.235	77.201	60,20
2	S. Ambawang	41.191	30.096	73,06
3	Kuala Mandor	15.560	11.385	73,17
4	Sungai kakap	68.114	42.315	62,12
5	Teluk Pakedai	10.237	7.684	75,06
6	Rasau Jaya	12.175	9.915	81,44
7	Kubu	24.338	14.370	59,04
8	Batu Ampar	22.884	14.206	62,08
9	Terentang	6.192	3.923	63,36
TOTAL		328.926	211.095	64,18

(Sumber : Data KPU Kubu Raya Tahun 2012)

Tabel. 2

Perbandingan Jumlah Pemilih Terdaftar dan Pemilih yang ikut memilih Pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 dan Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007

No	Kecamatan	Pemilih Terdaftar PILGUB 2012	Pemilih yang memilih	(%)
1	Sungai Raya	143.111	85.454	59,71
2	S. Ambawang	49.365	34.084	69,04
3	Kuala Mandor	17.773	12.309	69,26
4	Sungai kakap	78.971	47.049	59,58
5	Teluk Pakedai	13.772	8.107	58,87
6	Rasau Jaya	17.991	11.242	62,49
7	Kubu	27.968	16.069	57,45
8	Batu Ampar	24.560	14.426	58,74
9	Terentang	7.899	4.643	58,78
TOTAL		381.410	233.383	61,19

(Sumber : Data KPU Kubu Raya Tahun 2012)

Dari table diatas dapat dilihat bahwa pasrtisipasi pemilih pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2007 lebih tinggi dibanding partisipasi pemilih pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

Menurunnya pemilih yang memilih pada pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 membuat penulis ingin mengetahui Implementasi program sosialisasi KPU dalam Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya. Sehingga penulis beranggapan hal tersebut layak untuk diteliti dan dikaji lebih mendalam guna meningkatkan kualitas demokrasi dimasa yang akan datang. Atas dasar itulah penulis menentukan penelitian ini dengan judul “Implementasi program sosialisasi KPU pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya”.

B. TINJAUAN PUSTAKA

Model implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh Edward III disebut dengan *Direct and indirect Impact on Implementation*. Menurut model implementasi ini, terdapat empat factor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi suatu

kebijakan (dalam Agustino, 2006:156), yaitu:

a. Faktor Sumber Daya (*resource*)

Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sumberdaya ini, yaitu (1) Sumber Daya Manusia, (2)Anggaran (*Budgetary*), (3) Fasilitas (*Facility*), (4) Informasi dan Kewenangan (*Information and Authority*)Informasi juga menjadi factor penting dalam implementasi kebijakan, terutama informasi yang relevan dan cukup terkait bagaimana mengimplementasikan suatu kebijakan.

b. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi adalah suatu kegiatan manusia untuk menyampaikan apa yang menjadi pemikirannya dan perasaannya, harapan atau pengalamannya kepada orang lain.

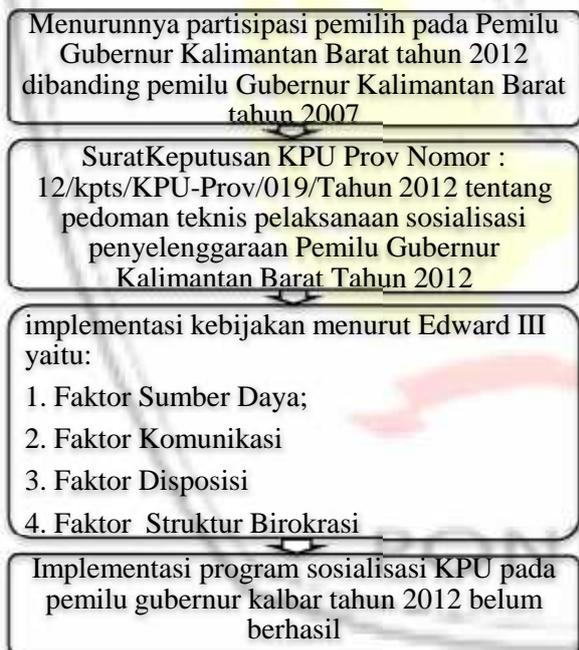
c. Faktor Disposisi (*Disposition*)

Dalam implementasi kebijakan menurut Edward III, jika ingin berhasil secara efektif dan efisien para implementor harus (1) mengetahui kewenangan dalam cakupan tugas yaitu mengetahui apa saja yang mereka lakukan, (2) mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk mengimplemen-tasikan kebijakan tersebut dan (3) mempunyai komitmen untuk mengimple-mentasikan kebijakan tersebut.

d. Faktor Struktur Birokrasi (*Burucratic Structure*)

Struktur Organisasi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Meskipun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan sudah mencukupi, dan para pelaksana kebijakan mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya serta mereka mempunyai keinginan untuk melakukannya, implementasi kebijakan bisa jadi belum efektif karena terdapat ketidakefisienan struktur birokrasi yang ada.

Gambar 1
Gambar Alur Pikir Kerangka Penelitian



C. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya yaitu Gustiar, S.Pd.I, Kasubbag Program dan Data pada KPU Kabupaten Kubu Raya yaitu Dumiri, S.Sos, M,Si, Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas yaitu H. Gustiar, S.Ip. sedangkan yang menjadi objeknya adalah sesuai dengan judul atau permasalahan yang diangkat yaitu implementasi program sosialisasi KPU pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua jenis triangulasi yaitu :Triangulasi Teknik dan Triangulasi Sumber

D. PEMBAHASAN

Peneliti mengamati tentang faktor sumber daya (*resource*), komunikasi (*communication*), disposisi (*dispotition*) dari pimpinan dan struktur birokrasi (*bureauratic structure*). Masing-masing faktor tersebut akan dibahas secara terinci sebagai berikut:

1. Faktor Sumber Daya (*Resource*)

a. Sumber Daya Manusia

Implementasi kebijakan tidak akan berhasil tanpa adanya dukungan dari

sumber daya manusia yang cukup kualitas dan kuantitasnya. Kualitas sumber daya manusia berkaitan dengan keterampilan, dedikasi, profesionalitas, dan kompetensi dibidangnya sedangkan kuantitas berkaitan dengan sumber daya manusia apakah sudah melingkupi seluruh kelompok sasaran.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua KPU Kubu Raya, Gustiar S.Pd.I, beliau menyatakan bahwa: *Secara umum Sumber Daya Manusia yang ada di KPU Kubu Raya, baik di Komisioner maupun di sekretariat KPU Kubu Raya, sudah cukup baik, dimana jenjang pendidikan di jajaran KPU Kubu Raya memiliki rata-rata berijazah S1 dan beberapa D3 tetapi ada pula yang memiliki gelar S 2 dan mereka juga telah dibekali dengan pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat dalam Pemilihan Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang lalu.*

Wawancara penulis dengan sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, Anusapati, S.Pd, M.Si, beliau menyatakan bahwa: *Setiap kegiatan yang akan diselenggarakan pada setiap program terutama program sosialisasi, KPU Provinsi Kalimantan Barat Selalu memberikan pelatihan kepada tim sosialisasi yang dibentuk kabupaten/kota, hal ini agar meningkatkan*

kualitas dan kuantitas tim dalam melaksanakan program sosialisasi.

Dari hasil wawancara dengan ketua dan sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya tersebut diatas dapat diketahui bahwa, Sumber daya aparatur KPU Kabupaten Kubu Raya baik secara kualitas maupun kuantitas, yang berdampak pada implementasi kebijakan program sosialisasi pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya sudah cukup maksimal dan sudah cukup optimal, dimana aparatur yang melaksanakan tugas tersebut memiliki pendidikan yang tinggi dan telah mengikuti pelatihan dan pengarahan yang diberikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Berkenaan dengan kompetensi anggota yang bertugas meng-implementasikan program sosialisasi di Kabupaten Kubu Raya, yanto, SE, menyatakan juga : *Setiap kegiatan yang akan dilaksanakan selalu diberikan pelatihan terlebih dahulu, dan diberikan pedoman dalam melaksanakan kegiatan tersebut.*

Ketua Kelompok kerja sosialisasi berpendapat tidak ada masalah akan hal itu. Artinya ditingkat kecamatan tidak menjumpai masalah penguasaan keahlian dalam melaksanakan program sosialisasi. Masalah dimungkinkan datang dari sisi lainnya. Berkenaan dengan hal tersebut

dibenarkan oleh Ketua KPU kubu raya, Gustiar, S.Pd.I, menyatakan bahwa :

Para pelaksana kegiatan sosialisasi rata-rata mampu untuk melakukan penyampaian informasi tahapan-tahapan pemilu, dan melaksanakan kegiatan sosialisasi. Karena sudah mengetahui pedoman pelaksanaan sosialisasi, akan tetapi tugas pelaksana pemilu bukan hanya sosialisasi akan tetapi banyak lagi kegiatan dan tahapan-tahapan lain yang dianggap penting yang harus dilaksanakan selain sosialisasi ini.

Dari pernyataan diatas dapat diartikan bahwa tidak ditemukan hambatan dan kemampuan sumber daya manusia, keluhan justru datang dari segi lainnya, dimana implementor merasa tugasnya bertumpuk.

b. Sumber Non Manusia

Sumber Daya non manusia terdiri atas sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, informasi, dan kewenangan. Berdasarkan wawancara dengan sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya, beliau menyatakan bahwa:

Ketersediaan anggaran di KPU Kabupaten Kubu Raya dalam melaksanakan program sosialisasi sudah sangat mencukupi, dimana setiap anggaran dalam setiap kegiatan sudah diajukan anggaran pengusulan dan diorganisir untuk melaksanakan kegiatan di setiap kegiatan di Kab/Kota .

Berkaitan dengan sumber daya berupa fasilitas, beliau menyatakan bahwa:

Kantor KPU Kabupaten Kubu Raya belum mempunyai gedung kantor sendiri karena saat ini gedung kantor KPU Kabupaten Kubu Raya masih bertatus pinjam pakai dengan Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat dimana cuma memiliki 6 ruangan, dimana setiap ruangan setiap sub-sub bagian ada yang bergabung menjadi satu ruang, seperti ruang kasubbag dan staf Teknis dan hupmas pemilu bergabung menjadi satu ruangan dengan kasubbag dan staf program dan data, hal ini sangat berpengaruh kepada hasil pekerjaan yang menjadi menumpuk.

Berkaitan dengan sumber daya berupa informasi dan kewenangan, beliau menyatakan bahwa :

Informasi merupakan hal penting dalam implementasi program sosialisasi KPU, informasi dimaksud dapat berupa data dan perubahan keputusan dari KPU Provinsi Kalimantan Barat yang menunjang pelaksanaan program sosialisasi KPU dalam Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 yang lalu. Sedangkan untuk wewenang KPU Kabupaten Kubu Raya dapat dilihat dalam Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Barat nomor 12/kpts/KPU-Prov/019/Tahun 2012 tentang pedoman teknis pelaksanaan sosialisasi

penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 pada bagian Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota.

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris KPU Kabupaten Kubu Raya tersebut diatas dapat diketahui bahwa sumber daya non manusia berupa anggaran, fasilitas, informasi dan kewenangan telah dimiliki KPU Kabupaten Kubu Raya walaupun dengan keadaan gedung yang sangat kecil, tetapi masih dapat dipaksakan digunakan untuk menunjang kelancaran implementasi program sosialisasi KPU pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya.

2. Faktor Komunikasi (*communication*)

Komunikasi dalam implementasi program sosialisasi KPU pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 berupa pengetahuan pelaksana program sosialisasi yaitu KPU Kabupaten Kubu Raya akan tugas pokok dan fungsinya, yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012.

Wawancara penulis dengan salah satu masyarakat sekitar KPU Kabupaten Kubu Raya, Harsani ahmad, menyatakan :

Pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 lalu, KPU kubu raya banyak melakukan kegiatan sosialisasi diantara-

nya, penyelenggaraan gerak jalan sehat, lomba cerdas cermat ingkat SLTA, dan buka puasa bersama, dimana hal tersebut dapat memberitahukan akan jadwal penyelenggaraan pemilu serta pentingnya pemilu. selain itu, yang ditunggu masyarakat khususnya ibu-ibu sekitar adalah jadwal pelipatan surat suara, dimana setiap penyelenggaraan pemilu KPU Kabupaten Kubu Raya selalu mengundang para ibu-ibu yang ingin berpartisipasi dan mendapatkan hasil dengan melipat surat suara, hal ini bisa menambah pengetahuan dan pengenalan terhadap pasangan calon Gubernur.

Hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang telah diterapkan oleh tim kelompok kerja sosialisasi KPU pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 sudah cukup efektif.

3. Faktor Disposisi (*Disposition*)

Implementasi program sosialisasi pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 di KPU Kabupaten Kubu Raya, yang berkaitan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat dan mendorong partisipasi pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, membutuhkan komitmen yang tegas dari unsur pimpinan, yaitu pimpinan KPU Kabupaten Kubu Raya sebagai penyelenggara pemilu di tingkat Kabupaten. Komitmen tegas dari pimpinan

tersebut sangat diperlukan untuk mengambil langkah-langkah strategis dalam menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan partisipasi pemilih di Kabupaten Kubu Raya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan Ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Gustiar, S.Pd.I, beliau menyatakan bahwa:

Penunjukan tim kelompok kerja sosialisasi telah di pilih menurut pengalaman pada pemilu-pemilu sebelumnya, dan telah dirapatkan dengan anggota KPU kubu raya serta sekretaris KPU kubu raya dan membahas tentang kinerja para pelaksana yang masuk dalam tim kelompok kerja sosialisasi. Mereka yang masuk tim kelompok kerja sosialisasi ini memiliki dedikasi yang tinggi dan juga telah mengikuti pelatihan yang diselenggarakan KPU Provinsi Kalimantan Barat untuk mengikuti petunjuk-petunjuk penyelenggaraan sosialisasi agar memiliki komitmen yang tinggi dalam melaksanakan sosialisasi.

Hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa, tim kelompok kerja sosialisasi KPU Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya telah memiliki dedikasi yang baik untuk implementornya, akan tetapi tiada wajah-wajah baru yang menjadi implementornya.

Sosialisasi yang dilakukan KPU Kabupaten Kubu Raya lebih diberikan kepada tugas dan wewenang kepada PPK dan PPS yang juga sebagai jajarannya untuk melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat. Ini sesuai dengan pendapat yang disampaikan oleh ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Gustiar, S.Pd.I yang saat ditanya menurut nya bahwa:

KPU merupakan kelembagaan, jadi dia bersifat hirarki dimana ada KPU Kabupaten, kemudian ada PPK, PPS dan kemudian ada KPPS, nah karena itu cenderung yang kita utamakan itu sosialisasinya bersifat hierarki dan terstruktur, KPU ditingkat Kabupaten, ditingkat kecamatan dilaksanakan oleh PPK, kemudian ditingkat desa dilaksanakan oleh PPS dengan mengundang kelompok-kelompok yang berkepentingan misalnya tokoh-tokoh masyarakat dan partai politik. Nah diluar itu ada juga bentuk-bentuk sosialisasi yang kami lakukan melalui media seperti melakukan talkshow di televisi-televisi local, pemberitaan di koran-koran, dan ada juga dalam bentuk spanduk atau baliho pada umumnya bersifat ajak-ajakan terhadap masyarakat, agar pada hari pemungutan suara mereka mau datang ke TPS untuk menggunakan hak pilih yang mereka miliki.

Berdasarkan pendapat yang diutarakan ketua KPU Kabupaten Kubu

Raya jelas bahwa mereka telah melaksanakan tanggung jawabnya sebagai penyelenggara pemilu dengan baik. Sosialisasi yang mereka lakukan lebih kepada penghimbau kepada masyarakat agar mau menggunakan hak suara yang dimiliki, selain itu sosialisasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Kubu Raya juga berbentuk pemberitahuan mengenai tanggal pemungutan suara.

4. Faktor Struktur Birokrasi (Bureaucratic Structure)

Aspek struktur yang penting setiap organisasi adalah Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak dalam bertindak. SOP dalam hal ini mencakup mekanisme, system, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi, kewenangan dan tanggung jawab diantara para pelaku. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks yang pada akhirnya menyebabkan aktivitas organisasi yang tidak fleksibel.

Sebagaimana yang diungkapkan sekretaris kelompok kerja sosialisasi KPU Kabupaten Kubu Raya, Dumiri, S.Sos, M.Si menyatakan bahwa :

Dalam pelaksanaan sosialisasi Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 kami telah melaksanakan semua kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi penyampaian informasi dan telah sesuai dengan standar prosedur operasional (SOP) yang diberikan oleh KPU Provinsi Kalimantan Barat. Seperti pembagian baliho-baliho yang berisi himbauan dan pengumuman tahapan yang akan dilaksanakan dan ini diinstruksikan kepada PPK, PPS, PPDP serta KPPS, untuk memasang baliho tersebut di setiap tingkatan.

Jika dihubungkan dengan kegiatan program sosialisasi pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya. Dari segi cakupan tugas, kegiatan yang terkait dengan sosialisasi penyampaian informasi pemilu, telah berjalan optimal dimana pihak implementor tersebut dibawah satu komando yaitu KPU Provinsi Kalimantan Barat sebagai komando dalam melaksanakan program sosialisasi, dan kemudian turun ketingkat KPU Kabupaten maka kecil terjadinya hambatan-hambatan dalam implementasi program sosialisasi.

Hal tersebut sesuai dengan yang dikatakan oleh ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Gustiar, S.Pd.I menyatakan bahwa :
Pelaksanaan program sosialisasi pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun

2012 di Kabupaten Kubu Raya, banyak melibatkan banyak pihak, seperti wartawan, camat, kepala desa dan Rt/Rw dan lain sebagainya, yang membantu dalam penyampaian informasi, akan tetapi dalam pelaksanaan penyampaian informasi tersebut tidak lepas dari pantauan dan instruksi dari KPU Provinsi Kalimantan Barat.

Dari pernyataan diatas maka dapat diketahui ternyata banyaknya pihak yang terlibat dalam penyampaian informasi sosialisasi KPU pada pemilu Gubernur kalimantan barat tahun 2012, tidak lepas dari pantauan dan intruksi dari KPU Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012.

KPU Provinsi Kalimantan Barat selaku penyelenggara Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012, membuat pedoman sosialisasi ini mengharapkan menekan angka partisipasi pemilih semakin meningkat, akan tetapi kenyataan di Kabupaten Kubu Raya, angka partisipasi pemilih di kubu raya pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 menurun dibandingkan dengan Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2007.

Terlepas dari masalah menurunnya angka partisipasi pemilih pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya, ketua KPU Kabupaten Kubu Raya, Gustiar,S.Pd.I menyatakan :

Sebenarnya dalam Pemilukada yang menentukan tinggi rendahnya partisipasi bukan terletak disosialisasi KPU saja, akan tetapi peran peserta pemilukada dan partai politik pengusung para calon, karena yang berkepentingan orang hadir ke TPS itu bukan KPU tetapi calon yang bersangkutan dan partai pengusung. Dimana calon yang bersangkutan mengajak pemilih untuk hadir ke TPS pada saat kampanye semakin tinggi partisipasi pemilih hadir ke TPS semakin efektif kampanye yang dilaksanakan oleh para calon maupun partai pengusung.

Dari pernyataan diatas dapat diketahui, dalam hal sosialisasi penyampaian informasi dalam meningkatkan partisipasi pemilih, yang memiliki peran penting sebenarnya bukan KPU saja akan tetapi melainkan para pasangan calon dan partai politik karena calon yang secara langsung mempunyai kepentingan agar masyarakat datang ke TPS untuk memilih mereka. Selain itu partai politik juga mempunyai peran penting dalam hal ini karena partai politik merupakan kendaraan para calon yang non independen tersebut.

E. PENUTUP

a) Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang penulis sampaikan pada bagian pembahasan, ada beberapa hal yang dapat penulis simpulkan dari implementasi program sosialisasi KPU pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya. Adapun kesimpulan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya

Berdasarkan hal tersebut dalam implementasi program sosialisasi pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya penulis melihat terdapat kelemahan dari sumberdaya ini. Hal tersebut tergambar jelas dimana tim pelaksana program sosialisasi ditingkat Kabupaten Kubu Raya tidak mencapai 20 orang. Kurangnya pelaksana juga terjadi ditingkat kecamatan, dimana ditingkat kecamatan hanya terdiri dari 8 orang saja. Untuk Sumber Daya non manusia terdiri atas sumber daya anggaran, sumber daya fasilitas, informasi, dan kewenangan. Dalam hal sumberdaya anggaran, informasi dan kewenangan KPU Kab. Kubu Raya sudah maksimal, akan tetapi untuk fasilitas terutama gedung kantor KPU Kabupaten Kubu Raya sangat mengkhawatirkan dimana beberapa sub bagian dijadikan satu ruangan.

2. Komunikasi

Komunikasi dalam implementasi program sosialisasi KPU pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012 berupa pengetahuan pelaksana program sosialisasi yaitu KPU Kabupaten Kubu Raya akan tugas pokok dan fungsinya, yaitu melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilu Gubernur Kalimantan Barat Tahun 2012, komunikasi yang telah diterapkan oleh tim kelompok kerja sosialisasi KPU pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 sudah cukup efektif.

3. Disposisi

Pembentukan kelompok kerja sosialisasi KPU Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya telah memiliki dedikasi yang baik untuk implementasinya yang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan sosialisasi dari pemilu sebelumnya.

4. Struktur Birokrasi

Dalam implementasi program sosialisasi dalam penyampaian informasi, banyak pihak yang terlibat, akan tetapi pihak-pihak tersebut tidak lepas dari pantauan dan intruksi dari KPU Provinsi Kalimantan Barat.

b) Saran

Berdasarkan simpulan penelitian diatas, peneliti menyampaikan saran-saran terkait dengan implementasi program

sosialisasi KPU pada Pemilu Gubernur Kalimantan Barat tahun 2012 di Kabupaten Kubu Raya, adapun saran-saran tersebut antara lain:

1. KPU Kabupaten Kubu Raya hendaknya dapat memperhatikan sumberdaya manusia dan non manusia agar lebih memadai. Jumlah tim pelaksana sosialisasi perlu ditambah agar kelangsungan implementasi program sosialisasi dapat lebih maksimal.
2. Penyampaian informasi kepada masyarakat dapat lebih ditingkatkan lagi, yaitu dengan melakukan sosialisasi secara rutin.
3. Memperhatikan lagi masalah reward kepada pelaksana kebijakan.
4. Melakukan koordinasi yang lebih baik lagi diantara pihak yang terlibat.

F. REFRENSI

Agustino, Leo. 2006. *Dasar – Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Alfabeta.
Sugiono, 2007, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung :CV. Alfabeta

Undang-undang *Nomor* 15 Tahun 2011
keputusan KPU Kalimantan Barat nomor
12/kpts/KPU-Prov/019/Tahun 2012



KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA

Jalan Prof Dr. H. Hadari Nawawi Pontianak 78124 Telp. 0561-740188 Kotak Pos 1049

Homepage: <http://jurnafis.untan.ac.id>

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA

Sebagai civitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama lengkap : Syahiran
NIM : E21109053
Tanggal Lulus : 5 Februari 2016
Fakultas/ Jurusan : ISIP / Ilmu Administrasi Negara
E-mail address/ HP : shelembhe@yahoo.co.id/ 089693814949

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan pemenuhan syarat administrative kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Publika *) pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti, Non-eksklusif (*Non-exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **):

IMPLEMENTASI PROGRAM SOSIALISASI KPU PADA PEMILU GUBERNUR
KALIMATAN BARAT TAHUN 2012 DI KABUPATEN KUBU RAYA

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif ini, Pengelola Jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/ format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/ mempublikasikannya di Internet atau media lain):

- Secara *fulltex*
 content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dana tau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Pengelola Jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.



Mengetahui/ disetujui
Pengelola Jurnal Publika

Dr. Erds M.Si.
NIP. 196707272005011001

Catatan:

*tuliskan nama jurnal sesuai prodi masing-masing
(*Publika/Governance/Aspirasi/Sociodev/Sociologque*)

Dibuat di : Pontianak
Pada tanggal : 24 Maret 2016

Syahiran
NIM. E21109053

Setelah mendapat persetujuan dari pengelola Jurnal, berkas ini harus di scan dalam format PDF dan dilampirkan pada step4 upload supplementary sesuai proses unggah penyerahan berkas (submission author)